



PERSPEKTIF IDEOLOGI DAN KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN MACHIABELLI: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019

Haura Atthahara

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang.
haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id*

*Received: 18 Maret 2020; Revised: 19 Maret 2020; Accepted: 20 Maret 2020; Published: April 2020; Available
online: April 2020.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan cara kedua pasangan calon presiden dalam mengangkat isu agama pada kampanye Pilpres 2019 dengan mengkaji dari perspektif teori Machiavelli. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh mengacu pada studi literatur. Hasil dari penelitian yang di dapat mengungkapkan bahwa dalam Pemilu 2019 isu agama dijadikan sebagai kepentingan politik praktis jika dilihat dari sisi pemikiran ideologi dan kekuasaan menurut Machiavelli. Penggunaan isu agama untuk kepentingan politik praktis secara sosial dapat memecah belah persaudaraan antar sesama umat beragama, disisi lain secara politik dapat merubah peta pemilih dan esensi demokrasi akibat adanya fragmentasi dalam tatanan politik dan dampak secara budaya dapat menggerus budaya ramah tamah dan toleransi dalam perbedaan akibat beda pilihan politik.

Kata kunci: Perspektif, Ideologi, kekuasaan, Machiavelli, Pilpres 2019

Abstract

This research was conducted to explain the way the two presidential candidates in raising religious issues in the 2019 Presidential Election campaign by examining from the perspective of Machiavelli's theory. The method used is descriptive method using qualitative. Sources of data obtained were collected in literature studies. The results of research that can reveal the facts in the 2019 Election religious issues are made as political interests when viewed from the perspective of ideology and power according to Machiavelli. The use of religious issues for practical political interests about dividing brotherhood among fellow religious communities, on the other hand about politics can change the direction of candidates for political choice.

Keywords: *perspective, ideology, power, Machiavelli, Presidential Election 2019*

PENDAHULUAN

Istilah ideologi menurut Sutrisno (2006:24), pertama diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1976 di Perancis, telah terjadi pergeseran arti begitu rupa sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah dengan pengertian yang kompleks. Menurut Syamsudin (2009:98), secara etimologis ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai.

Weber memberikan pandangannya terhadap hubungan antara ideologi dengan kekuasaan, yang mana menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan memiliki berbagai

macam bentuk dan bermacam sumber¹. Dimana terdapat hubungan sosial antara masyarakat maupun kelompok, pastilah disana ada kekuasaan. Dalam mencari suatu kekuasaan pastinya diperlukan beberapa sumber-sumber yang bisa dipergunakan untuk merebut, dan mempertahankan kekuasaan, yakni militer, ekonomi, politik, hukum, ideologi, tradisi, ideologi, *diversionary power*. Salah satu sumber yang seringkali dipergunakan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan adalah ideologi.

Ideologi sebagai sebuah sarana merebut kekuasaan akan dikembangkan secara penuh ketika kekuasaan sudah diperoleh. Fungsi dari pengembangan ideologi ketika berkuasa adalah untuk mempertahankan eksistensi dari kekuasaan yang sudah diperoleh. Jika ideologi sudah berhasil dikembangkan maka kekuasaan yang diperoleh tentunya akan tetap bertahan. Pengembangan ideologi dalam sebuah kekuasaan tergantung dari ideologi mana yang dianut oleh pemegang kekuasaan. Apakah ideologi yang bersifat terbuka atau tertutup.

Ahli lain yang mendefinisikan kekuasaan adalah Machiavelli menurutnya kekuasaan haruslah diperoleh,

¹Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal 268-269

digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri dimana segala kebijakan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Nicollo Machiavelli memberikan citra buruk terhadap negara yang lebih ditekankan pada politik. Machiavelli dengan merujuk kasus G. Savanarolo (1452-1498) dari Ordo Dominikan dan didasari pengalamannya mendampingi raja-raja Italia, serta kasus Ferdinand dari Aragon, Spanyol berkesimpulan betapa mustahilnya membangun kekuasaan atas dasar moral.

Konsep kekuasaan Machiavelli ini erat terkait dengan Pilpres 2019 pasalnya praktik menghalalkan berbagai cara untuk mencapai kekuasaan terlihat dari isu agama yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk meraih kekuasaan sementara masyarakat terbelah. Hal ini terjadi karena adanya benang merah antara kekuasaan dan pemilu. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat yang dianut di negara Indonesia, secara politik bisa kita lihat dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilu diselenggarakan secara periodik dilaksanakan lima tahun sekali sebagai bentuk

kedaulatan rakyat sejak era reformasi. Melalui pemilihan umum inilah kekuasaan didapatkan. Penggunaan isu agama untuk meraih suara dalam Pilpres 2019 dari kedua pihak yakni pasangan Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno tidak bisa dipungkiri bahwa kampanye "Anti Penista Agama", "Kriminalisasi Ulama", "Anti Pancasila" dan "Pendukung Khalifah" propaganda seperti ini memicu rasa takut dan pembelahan pemilih di tingkat akar rumput. Dalam kajian Pilpres 2019 menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan sesuai teori Machiavelli yang menyatakan bahwa faktor agama diperbolehkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Sehingga isu khalifah (Pihak Prabowo - Sandi) dan isu kriminalisasi ulama (Jokowi - Ma'ruf).

Identifikasi Masalah

Secara kultural, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dimana agama dianggap penting. Maka dari itu, dalam pemilihan presiden banyak aktivitas-aktivitas yang mengunjungi kantong-kantong pemilih yang memiliki basis-basis ikatan latar belakang baik itu pemilih etnis, suku maupun agama itu sendiri. Namun isu agama ini dijadikan sebuah

politisasi keagamaan yang merujuk pada *black campaign* seperti Simbol agama yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk saling menjatuhkan kubu lawan yang pragmatis dapat mempengaruhi sebuah pilihan.

Dengan mempolitisasi agama dalam pemilihan presiden ini sama halnya dengan pemikiran Politik Praktikal dari Machiavelli (2007: 51) yaitu *The End Justifies the Mean*. Dalam usaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan membenarkan segala cara tanpa mengindahkan agama/moral dan semata-mata hanya dijadikan sebuah alat perolehan massa dalam Pilpres tersebut.²Fanatisme Publik dalam agama menciptakan perpecahan yang terjadi ketika agama dipolitisasi sehingga masyarakat Indonesia otomatis terbagi dalam fragmentasi agama.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian tulisan ini yaitu "Bagaimana perspektif ideologi dan kekuasaan Machiavelli pada Pemilihan Presiden 2019?". Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode atau cara dari kedua pasangan calon presiden dalam mengangkat isu-isu terkait agama pada kampanye Pilpres ditinjau dari sudut pandang teori

Machiavelli. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan mampu digunakan sebagai kajian, referensi pengembangan dan sebagai bahan rujukan serta mampu dijadikan sebagai gagasan pengembangan teori yang digunakan kedua paslon pada Pilpres 2019. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dan pembaca dalam memahami metode yang digunakan kedua paslon dalam kampanye Pilpres 2019 dalam perspektif Machiavelli.

TINJAUAN PUSTAKA

Biografi dan Konsepsi Kekuasaan Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli merupakan sejarawan Italia, politisi, diplomat, filsuf, humanis dan penulis yang berbasis di Florence selama Renaissance. Beliau lahir pada 3 Mei 1469 (beberapa tahun sebelum kejatuhan Kerajaan Islam Granada) di kota Florence, Itali. Ketika berusia 12 tahun, Machiavelli belajar mengenai ilmu-ilmu kemanusiaan di bawah asuhan Paulo Ronsiglione dalam suasana mewah dan serba cukup. Machiavelli mengikuti kuliah di Universitas Florence. Ketika di bangku kuliah, beliau gemar mempelajari kajian-kajian dari Marcello Adriani. Setelah lulus,

² Tambunan, Corina. Dalam Tesis berjudul "Moralitas dan Kekuasaan: Studi atas Pemikiran Nicollo

Machiavelli 1469 – 1527". (Pasca Sarjana Departemen Filsafat, UI, Depok 2007. Hlm 51

beliau mendapat tempat dalam pemerintahan, yaitu sebagai setia usaha di negaranya dan juga sebagai seorang diplomat yang memberikannya banyak pengalaman berharga dalam aspek kenegaraan.

Ketika Machiavelli berusia 25 tahun, beliau menyaksikan perjuangan Giotamo Savonarola, yaitu seorang politikus moral yang kuat memegang ajaran konservatif gereja serta tegar membentuk fahaman sekularis-humanis di Itali yang membela kaum miskin. Namun, perjuangan Savonarola gagal walaupun berjaya menghalau pemerintah Florence (Piero De Medici anak kepada Lorenzo Yang Agung) dengan bantuan Raja Charles VIII daripada Perancis.

Kegagalan Savonarola dalam memurnikan sekularis kerana tidak adanya kekuatan politik dan tentera yang dimilikinya. Pada Ogos 1499, ketika berusia 28 tahun, terjadi peristiwa Vitelli. Vitelli adalah seorang pemimpin tentara bayaran yang disewa oleh pemerintah Florence untuk menjajah Pisa. Disebabkan orang-orang Pisa memberikan bayaran yang lebih kepada Vitelli daripada bayaran pemerintah Florence, maka Vitelli pun tidak

berdaya untuk menyerang Pisa. Bermula saat itulah, Machiavelli menyimpulkan bahwa sehebat apapun tentera upahan yang disewa, beliau lebih setuju untuk kalah berperang dengan menggunakan tentera sendiri berbanding menang dengan menggunakan tentera upahan.

Sebagai tokoh politik, Machiavelli sempat menjalin diplomasi dengan bangsawan tinggi kota Valentino, Cesare Borgia pada tahun 1498. Ketika Borgia ingin menakluki Itali yang sedang dikuasai oleh Paus Julius II, Machiavelli menjadi pemerhati kegiatan Borgia yang setia. Karier politiknya berakhir pada tahun 1513 ketika beliau ditangkap, diadili dan disiksa dengan alasan berkonspirasi untuk menggulingkan kekuasaan Medici. Setelah setahun di penjara, akhirnya beliau pun dibebaskan dan kemudian menulis hasil pengamatan dan pengalamannya selama di pendalaman San Casciano. Machiavelli meninggal tahun 1527 pada usia 58. Ia dimakamkan di Gereja Santa Croce di Florence, Italia.³

Niccolo Machiavelli, melalui karyanya yang berjudul *The Prince* (1513) ia menguraikan sebuah teori politik kekuasaan sebagai berikut (Skinner, 1985:4) :

³ Yulizar, Faradiena. *Review Tokoh Pemikir Modern dan Kontemporer "Machiavelli"*. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

- a. Untuk melakukannya, seorang penguasa yang bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan Negara. hanya memaduka *machismo* semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajiban kepada Negara mencapai keabadian sejarah.
- b. Penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut:
 - Sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun dibenci
 - Watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin dan kontrol diri.
 - Sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya dan tulus.
- c. Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapa pun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan Negara.

Pemikiran Machiavelli bagi perkembangan teori-teori perang dan kemiliteran yakni beliau

menyarankan kepada penguasa agar selalu belajar dari pengalaman penguasa atau kaisar-kaisar lain di masa lalu. Seorang penguasa tidak perlu malu-malu untuk mencontoh keberhasilan - keberhasilan mereka. Menurut Machiavelli, cara belajar demikianlah yang dilakukan Alexander Agung yang mencontoh Achilles, Caesar dan Scipio Syrus.

Bagi Machiavelli, kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri dimana segala kebijakan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Penguasa yang baik harus berusaha mengejar kekayaan dan kejayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki seorang penguasa. Tulisan-tulisan Niccolo Machiavelli dalam Sang Penguasa memberikan pemahaman dan gambaran mengenai persoalan kekuasaan, inti dari setiap persoalan dan kekuasaan itu adalah bagaimana menciptakan kekuasaan yang stabil dan lestari. Penguasa bukanlah pengemban keutamaan-keutamaan moral. Kekejaman dapat dimanfaatkan dan dipraktikan oleh seorang penguasa dalam situasi yang mendesak, atau dalam tuntutan situasi suatu wilayah yang harus diatasi dan diselesaikan. Inovasi Machiavelli dalam buku

Discourses on Livy dan *The Prince* juga memberikan pemahaman tentang pemisahan teori politik dan etika. Machiavelli orang yang pertama kali mendiskusikan fenomena sosial politik tanpa merujuk pada sumber-sumber etis maupun hukum. Baginya, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.⁴

Niccollo Machiavelli memberikan citra buruk terhadap negara yang lebih ditekankan pada politik. Machiavelli dengan merujuk kasus G. Savanarolo (1452-1498) dari Ordo Dominikan dan didasari pengalamannya mendampingi raja-raja Italia, serta kasus Ferdinand dari Aragon, Spanyol berkesimpulan betapa mustahilnya membangun kekuasaan atas dasar moral.

Politik dalam pandangan Machiavelli, hanya digunakan untuk menyebut dan mengingatkan para pangeran (kelompok elite), bahwa mereka benar-benar saling berperang demi kekuasaan, bukan demi prinsip-prinsip mulia yang seringkali diobrolkan. Seringkali agama yang bermuatan moral menjadi alat kekuasaan agar elite lain tidak mengganggu kekuasaannya. Oleh karena itu demi kekuasaannya semestinya raja harus mencari penghargaan dan kemuliaan dari rakyat. Rakyat hanya

membutuhkan ketenangan untuk bekerja mencapai kemakmuran dan rasa aman.

Negara seharusnya melayani rakyat, dengan mekanisme yang meyakinkan pemerintah harus bisa bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebaliknya. Semestinya penguasa "*to reign*" bukan "*to rule*" (pemerintah memberi pengarahan bukan semata menggunakan kekuasaan). Pemerintah yang tidak terbatas memiliki kecenderungan menciptakan klik-klik penguasa abadi, bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk mengatasi hal tersebut, otoritas politik harus dibatasi dengan pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak boleh diberikan pada suatu organ).

Masyarakat telah memberikan mandat pada penguasa untuk menjalankan kekuasaan bahkan dominasi, baik melalui kekerasan maupun legitimasi. Namun, hal itu hanya berlaku pada ranah normatif, bukan digunakan untuk menghadapi keserakahan manusia, baik individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Yang kerap kali terjadi, persetujuan rakyat, tetapi dengan berbagai cara, semisal; melalui keputusan manipulatif, pembentukan opini secara

⁴ ibid

persuasif atau bahkan dengan praktek dominasi. Manipulasi kepercayaan massa melalui kekuasaan yang diekspresikan dalam bentuk jalinan politik, sosial, budaya, melalui cara-cara persuasi serta melalui mekanisme konsensus itulah yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni ini kemudian akan melahirkan formasi sosial yang asimetrik yang mengorbitkan timbulnya dominasi serta aroganisasi elite yang membuatnya semakin jauh dari kehidupan masyarakat.

Pemilu Presiden (Pilpres 2019)

Konsep politik di dalam negara demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada pasal 1 ayat 2:

“Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, secara politik bisa kita lihat dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu diselenggarakan secara periodik dilaksanakan lima tahun sekali sebagai bentuk kedaulatan rakyat sejak era reformasi. Berpedoman

pada UUD NKRI 45, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka secara konstitusional, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan kepemimpinan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam bentuk Pemilu.⁵

Pelaksanaan Pemilu tertuang pada UUD NRI 1945 pasal 22E ayat 1:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

Dan penyelenggara Pemilu diatur pada ayat 5:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”

Pelaksanaan pemilu secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan berpedoman pada asas pemilu pasal 2:

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Dan prinsip pemilu pada pasal 3:

“bahwa prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian

⁵ Ahmad, Syarif. 2019. Legitimasi Pemilu, Available at <https://www.kompasiana.com/pundunence/5c38117367>

[7ffb71a87653b5/legitimasi-pemilu?page=4](https://www.kompasiana.com/pundunence/5c38117367) (Diakses pada 26 November 2019)

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁶

Berdasarkan asas dan prinsip Pemilu tersebut menjadi ukuran kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Asas dan prinsip Pemilu, kemandirian penyelenggaraan Pemilu adalah sifat pelaksanaan Pemilu yang tidak berpihak kepada peserta Pemilu.⁷ Kemandirian sebagai perwujudan asas dan prinsip pelaksanaan sistem Pemilu yang demokratis, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 1 ayat 7 bahwa:

“Penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum

(KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).”

Dalam Pemilu Pilpres 2019, pihak-pihak yang terlibat diantaranya yaitu:

1. Bawaslu, lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Panwaslu, sebagai wasit yang baik. Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI Tingkat permanen netralitas terjaga baik di pusat, provinsi.

⁶ Pebriansyah, Ariefana. 2017. Delapan Pihak yang Membuat Pemilu dan Pilkada Sukses, <https://amp.suara.com/news/2017/01/31/134720/delapa>

n-pihak-yang-membuat-pemilu-dan-pilkada-sukses. (Diakses 23 November 2019)

3. KPU, Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Polri, TNI dan Linmas dalam pilpres, aparat tersebut berkepentingan dalam menjaga ketertiban selama pilpres berlangsung, aparat juga diminta netral dalam penyelenggaraan Pilkada.
5. Media yang ikut berperan untuk melindungi bukan media yang memanasakan Pilkada, selain menjadi wadah informasi, media juga mempunyai peran menjadikan proses demokrasi di Indonesia akan semakin baik dan bermutu. Secara ideal, dalam setiap pemberitaannya selalu berusaha netral dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
6. Pasangan calon yang telah melalui tahap penyeleksian baik ditingkat partai politik hingga ketingkat KPU untuk selanjutnya disahkan.
7. Partai politik. Baik Partai Politik yang tergabung di koalisi tim Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga

mempunyai peran untuk menggalang dukungan dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Relasi Agama Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli Dalam Pilpres 2019

Perspektif pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan di dalam buku *il principe* yang ditafsirkan oleh Prof. Bintan M Saragih dan M. Kusnardi bahwa Machiavelli menekankan pentingnya unsur kekuasaan dalam negara. Pemerintahan tidak lebih dari sebuah upaya memperoleh kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan tersebut. Selain itu, Profesor Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin memiliki pemikiran serupa dengan sebelumnya. Menurut pemahaman mereka berdua, Machiavelli menyatakan bahwa suatu pemerintahan yang baik, pasti akan binasa, itu tidak cocok/asing dengan sistemnya dan lambat laun suatu saat akan disepak dari keluarganya⁸

Meski pemikirannya terlihat pragmatis, namun hal itu dipengaruhi dari masa dimana ia hidup, Machiavelli adalah seorang filosof yang hidup di

⁸ R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, "Ilmu Negara Urnum", Cetakan Kesebelas (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 60.

masa kejayaan pemikiran humanis *Renaissance* dan kemunduran pemikiran Gereja Katolik dan dampak dari situasi ini terjadi pada diri Machiavelli juga. Oleh sebab itu, Machiavelli kemudian disebut sebagai Sang Realis sebutan itu diberikan karena ia mengkonsepsikan pemikiran filsafatnya secara realistik, bukan suatu filsafat yang dipenuhi dengan ide-ide yang abstrak apalagi metafisis.

Dalam situasi demikian, posisi agama dihadapan Machiavelli itu bukan dilihat dari segi-segi idealnya, yang mengandung pesan-pesan teologis bagi umat manusia. Bagi Machiavelli, yang penting dari agama adalah bahwa agama bisa menjadi faktor dalam politik. Agama bisa menjadi faktor yang mengintegrasikan suatu negara, agama pun bisa menjadi pendukung patriotisme dan menguatkan pranata-pranata kebudayaan. Posisi Machiavelli yang demikian itu menandakan bahwa dalam melihat hubungan antara politik dalam suatu negara dengan agama, ia mengandaikan hubungan itu bersifat sekuler.⁹

Penggunaan faktor agama sebagai cara untuk meraih kekuasaan dalam konteks Pilpres 2019 terlihat dari tulisan Tom Pepinsky Professor Kajian Pemerintahan di Cornell University dan Nonresident Senior Fellow pada Foreign Policy di (2019) dua provinsi seperti Aceh dan Bali menjadi contoh pengaruh mayoritas agama pada perolehan suara dalam Pilpres 2019.¹⁰ Di Aceh yang mayoritasnya beragama islam suara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menurun drastis sedangkan di Bali dengan mayoritas agama Hindu suara pasangan ini melambung jauh mengungguli Prabowo-Sandi, begitu juga sebaliknya. Pola serupa juga terlihat di provinsi pemeluk agama Kristen terbesar seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara dimana perloehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf melambung, pola ini berlangsung secara konsisten dengan penguatan pembelahan pemilih atas dasar agama (*religious Clevage*) di Indonesia dimana kampanye Prabowo-Sandi cenderung menarik perhatian kaum muslim dan

⁹ F. Budi Hardiman, "Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal 15.

¹⁰ Tirto.id. 2019. Pembelahan Agama dan Etnis dalam Pilpres 2019. Available at: <https://tirto.id/pembelahan-agama-dan-etnis-dalam-pilpres-2019-eamN> (Diakses pada 21 November 2019)

kampanye Jokowi menarik non-muslim.¹³

Hasil dari pilpres merupakan output dari proses-proses politik yang terjadi selama masa kampanye, bahkan jauh sebelum kampanye terjadi pertimbangan pemilihan wakil presiden di kubu Jokowi menjadi politis mengingat citra pengusung partai PDIP yang sebelumnya mendukung pasangan Ahok-Djarot pada Pilgub DKI 2019 dengan kasus penistaan agama berdampak panjang pada identitas yang melekat pada dukungan PDIP kepada Jokowi. Metode dan cara untuk memainkan isu agama populisme islam, yaitu memainkan narasi memperjuangkan kepentingan umat islam yang selama ini diabaikan negara.¹¹ Seperti disebutkan, Vedi R Hadiz (2018) idiom budaya yang terkait dengan islam dibangun untuk mobilisasi dukungan publik dalam kontes kekuasaan dan sumberdaya berdasarkan identitas politik berbasis ummah. Ketakutan yang dieksploitasi adalah penguasaan ekonomi oleh kelompok minoritas (Cina), politik lebih dikuasai oleh

kalangan abangan dan non muslim semakin dipinggirkan dan lain sebagainya. Isu agama yang dimainkan oleh populisme islam seperti penistaan agama, kriminalisasi ulama, pro kafir, dan sebagainya hanyalah bagian kecil dari isu besar, yaitu tersisihnya umat islam dari sumber daya politik dan ekonomi sehingga kekuasaan harus direbut.¹²

Bagi populisme Islam, kelompok di sisi dan di belakang Jokowi tersebut selamanya akan memusuhi dan melemahkan Islam. Tak ada masa depan Islam bersama mereka. Narasi politik kedekatan, bersahabat, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam yang dibangun tak lebih sekadar pemanis bibir, panggung depan politik. Sementara panggung belakang, praktik sebenarnya, bertolak belakang seratus delapan puluh derajat. Diangkatnya Ma'ruf Amin sebagai Cawapres dipandang populisme Islam sebagai strategi politik pragmatis Jokowi untuk menghadang isu agama, serta mengelabui umat Islam; seolah-olah berpihak pada kepentingan umat Islam, memuliakan ulama, padahal

¹¹ Pebriansyah Ariefana. 2017. Delapan Pihak yang Membuat Pemilu dan Pilkada Sukses <https://amp.suara.com/news/2017/01/31/134720/delapan-pihak-yang-membuat-pemilu-dan-pilkada-sukses> (Diakses pada 21 November)

¹² Rosdi, Afriadi. 2018. Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-4169018/membaca-arah-populisme-islam-di-pilpres-2019> (Diakses pada 25 November 2019)

sejatinya adalah politik pemanfaatan.¹³

Alasan *kedua*, Ma'ruf Amin berasal dari NU. Kelompok konservatif - anti - pluralis memosisikan NU sebagai batu sandungan dalam meraih cita-cita politik keumatan yang mereka gariskan. NU dilihat secara pejoratif. NU dicap sebagai bunglon, bekerja sama dengan siapa saja untuk sekadar mengejar kekuasaan dengan melupakan agenda perjuangan politik umat Islam. Karena itu, sulit mengharapkan kelompok populisme Islam berdiri di belakang barisan NU dalam politik.¹⁴

Alasan *ketiga*, dan ini paling substantif, bahwa tujuan politik kelompok populisme Islam Indonesia selama ini adalah menjatuhkan citra dan *personal branding* Jokowi agar bisa dikalahkan dalam Pilpres 2019. Opini umat digiring, bahwa menjatuhkan Jokowi adalah pintu masuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dan ekonomi umat Islam. Perjuangan itu sudah dilakukan secara simultan dan konsisten sejak Pilpres 2014, kemudian mendapat momentum

bagus pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada Serentak 2018, dan bergaung terus menjelang pendaftaran Capres-Cawapres 2019. Karena itu, diangkatnya sosok ulama sebagai Cawapres Jokowi tidak akan melemahkan perjuangan politik populisme Islam untuk menjatuhkan Jokowi. Mobilisasi emosi umat Islam akan tetap dilakukan. Narasi politik yang dibangun tetap dalam koridor untaian bahasa *ummah*, bahasa agama. Hanya saja titik-tekan poinnya akan mengalami pergeseran (Afriadi Rosdi, 2018)¹⁵

Di pihak lain, Prabowo-Sandi didukung beberapa ulama kondang seperti Aa Gym, Habib Riziq dan Ustad Abdul Somad serta Ijtima Ulama I dan II yang terkait dengan GNPF Ulama. Menurut survey Cyrus Network menunjukkan mayoritas pendukung pasangan Prabowo-Sandi sebanyak 62% lebih mempercayai informasi politik di media sosial yang menyertakan simbol agama maupun kitab

¹³ Reza A. A. Watimena. 2019 Available at: <https://www.google.co.id/amp/s/rumahfilsafat.com/2019/07/17/publikasi-terbaru-agama-dan-kekuasaan-tinjauan-transkeilmuan-dan-kritik-ideologi/amp/> (Diakses pada 21 November 2019)

¹⁴ Dadang Darmawan. 2017. Agama dan Kekuasaan. <https://medanheadlines.com/2017/04/03/agama-kekuasaan-antara-politik-agama-dengan-politisasi-agama/> (Diakses Pada 21 November 2019)

¹⁵ Ibid

suci.¹⁶ Unsur keagamaan yang nampak pada pasangan ini pun tidak pula menyurutkan tudingan bahwa keduanya ingin menghidupkan khilafah untuk mengubah preferensi pilihan politik masyarakat. Hal ini juga sekaligus menimbulkan ketakutan di kelompok-kelompok minoritas. Konteks itu beralasan mengingat beberapa kelompok islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama telah menjadi bagian dari kelompok-kelompok pendukung Prabowo-Sandi. Hal ini membuat isu Khilafah dan tudingan-tudingan serupa mudah digunakan sebagai alat propaganda untuk mendelegitimasi posisi politik Prabowo.¹⁷

Dari fenomena diatas terbukti keduanya memainkan isu agama untuk meraih kekuasaan. Jokowi meski telah menggandeng Ma'ruf Amin namun tetap dicitrakan sebagai pendukung penista agama sedangkan Prabowo-Sandi pula dituding pendukung khalifah. Dalam pemikiran Machiavelli untuk

meraih kekuasaan dibenarkan untuk melakukan cara-cara yang bertentangan dengan moral sehingga isu agama dapat menjadi tools untuk melanggengkan kekuasaan.

Menurut penulis dengan adanya kegaduhan yang terjadi akibat adanya penggunaan isu agama untuk kepentingan politik praktis secara sosial dapat memecah belah persaudaraan antar sesama umat beragama, disisi lain secara politik dapat merubah peta pemilih dan esensi demokrasi akibat adanya fragmentasi dalam tatanan politik dan dampak secara budaya dapat menggerus budaya ramah tamah dan toleransi dalam perbedaan akibat beda pilihan politik.

KESIMPULAN

Kekuasaan menurut Machiavelli haruslah diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri dimana segala kebijakan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Dalam konteks Pilpres 2019 masing-masing dari kedua calon

¹⁶ Wiwoho, Bimo. 2018. Ijtimak Ulama II, Ajang Merawat Kedekatan Prabowo dan Rizieq. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180914143222-32-330256/ijtimak-ulama-ii-ajang-merawat-kedekatan-prabowo-dan-rizieq> (Diakses pada 26 November 2019)

¹⁷ Ibid

menggunakan isu agama yang memecah belah bangsa untuk mendapatkan kursi presiden. Hal ini sejalan dengan pemikiran Machiavelli untuk menghalalkan segala cara agar mempertahankan kekuasaan.

SARAN

Dalam sejarah perpolitikan dalam negeri, politik dan agama memang tidak bisa dipisahkan, namun yang menjadi masalah adalah ketika agama digunakan semata - mata untuk politik praktis dan memecah belah persatuan. Elit, aktor dan masyarakat seharusnya bisa dewasa untuk berdemokrasi mengedepankan visi, misi dan program dibanding ego sektoral, kesukutuan dan simbol-simbol keagamaan melalui kampanye yang beresensi dibanding memprovokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Adiwilaga, Rendy, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, Muhammad Ridha Taufik Rahman. Quo Vadis Islamic Populism? An Electoral Strategy. *Central European Journal of International and Security Studies* 13, no. 4: 432-453.
- Akbar, Zainun. (2018). *Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus PILKADA Aceh Tenggara 2017)*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- F. Budi Hardiman. (2004). *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Magnis-Suseno, Franz. (2005). *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Malo, Manasse dan Trisniningtyas, Sri. (1999). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI, 1999),
- Niken, Rosarita (2019) *Buku Pintar Pemilu 2019 seri pertama : Cerdas Memilih di Pemilu 2019 serta profil Capres - cawapres dan Partai Politik* , Jakarta : Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika
- R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin. (1989). *Ilrnu Negara Urnurn*. Cetakan Kesebelas Jakarta: Pradnya Pararnita

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Yulizar, Faradiena. *Review Tokoh Pemikir Modern dan Kontemporer "Machiavelli"*. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Website

Ahmad, Syarif. (2019). *Legitimasi Pemilu*. Available at: <https://www.kompasiana.com/pundunence/5c381173677ffb71a87653b5/legitimasi-pemilu?page=4> (Diakses pada 26 November 2019)

Dadang Darmawan. (2017). *Agama dan Kekuasaan*. Available at: <https://medanheadlines.com/2017/04/03/agama-kekuasaan-antara-politik-agama-dengan-politisasi-agama/> (Diakses Pada 21 November 2019)

Detik.com. *Detik PEMILU Real Count*. Available at: <https://www.detik.com/.pemilu/profil-calon/jokowi-maruf> (Diakses pada 20 November 2019)

Pebriansyah, Ariefana. *Delapan Pihak Yang Membuat Pilkada dan Pemilu Sukses*. Available at: <https://amp.suara.com/new>

[s/2017/01/31/134720/delapan-pihak-yang-membuat-pemilu-dan-pilkada-sukses](https://2017/01/31/134720/delapan-pihak-yang-membuat-pemilu-dan-pilkada-sukses) (Diakses pada

Rosdi, Afriadi. *Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019*. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-4169018/membaca-arah-populisme-islam-di-pilpres-2019> (Diakses pada 25 November 2019)

Tirto.id. *Pembelahan Agama dan Etnis dalam Pilpres 2019*. Available at: <https://tirto.id/pembelahan-agama-dan-etnis-dalam-pilpres-2019-eamN> (Diakses pada 21 November 2019)

Wiwoho, Bimo. 2018. *Ijtimak Ulama II, Ajang Merawat Kedekatan Prabowo dan Rizieq*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180914143222-32-330256/ijtimak-ulama-ii-ajang-merawat-kedekatan-prabowo-dan-rizieq> (Diakses pada 26 November 2019)